



Evaluasi Sinergitas Program CSR Bank BCA Ponorogo dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting

Erysa Nimastuti^{1*}, Sri Roekminiati², Ika Devy Pramudiana³, Sapto Pramono⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: erysanimas15@gmail.com

Abstract The acceleration of stunting reduction in Ponorogo Regency faces challenges regarding the complexity of the issue and regional fiscal constraints, necessitating strategic cross-sectoral collaboration. This study aims to evaluate the synergy of Bank BCA's Corporate Social Responsibility (CSR) program through the "Bakti BCA" scheme in supporting local government policies related to specific and sensitive nutrition interventions. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants from Bank BCA Ponorogo management, Bappeda, the Health Office, and beneficiary families, complemented by participatory observation and a review of the Regional Action Plan (RAD) documents. Data analysis was performed interactively by integrating the Collaborative Governance framework from Ansell and Gash, William N. Dunn's six policy evaluation criteria, and Mark Moore's Public Value concept to analyze the dynamics of cooperation and program performance achievements. The results indicate that the established synergy meets the criteria of appropriateness and effectiveness, where CSR interventions successfully bridged the gap in sanitation services and nutritional fulfillment in stunting locus villages uncovered by the regional budget (APBD). This collaboration proved successful in creating public value in the form of improved physical health status of toddlers, regional budget efficiency, and high community responsiveness. It can be concluded that this strategic partnership effectively accelerates the achievement of stunting reduction targets through equitable resource distribution. This study recommends that private sector engagement be formally integrated from the development planning deliberation (Musrenbang) stage to ensure long-term impact sustainability.

Keywords: Bank BCA; Collaborative Governance; Cross-Sector Synergy; Public Value; Stunting Reduction

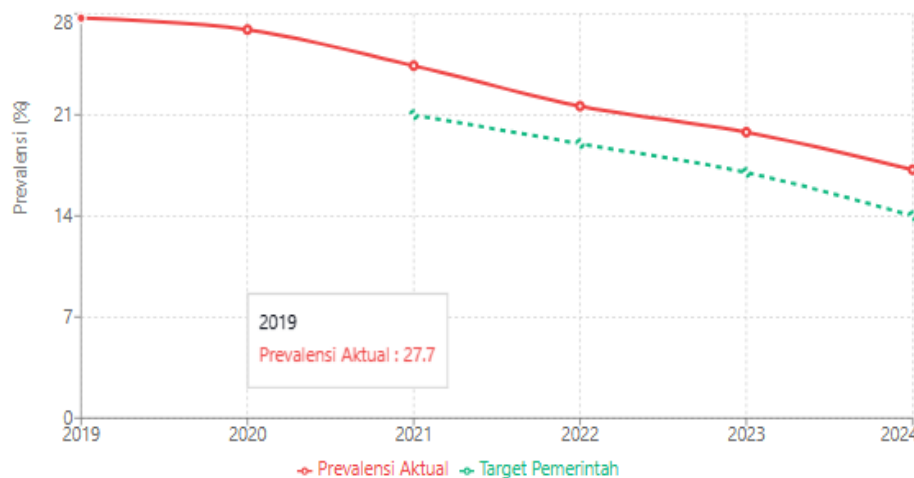
Abstrak Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan kompleksitas masalah dan keterbatasan fiskal daerah yang menuntut adanya kolaborasi lintas sektor yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sinergitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BCA melalui skema "Bakti BCA" dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait intervensi gizi spesifik dan sensitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari manajemen Bank BCA Ponorogo, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta keluarga penerima manfaat, yang dilengkapi dengan observasi partisipatif dan telaah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD). Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dengan memadukan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, serta konsep Public Value dari Mark Moore untuk membedah dinamika kerjasama dan capaian kinerja program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas yang terbangun telah memenuhi kriteria ketepatan (*appropriateness*) dan efektivitas, di mana intervensi CSR mampu mengisi kesenjangan layanan sanitasi dan pemenuhan gizi di desa lokus stunting yang tidak terjangkau APBD. Kolaborasi ini terbukti berhasil menciptakan nilai publik berupa peningkatan status kesehatan fisik balita, efisiensi anggaran daerah, serta tingginya responsivitas masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kemitraan strategis ini efektif mengakselerasi pencapaian target penurunan stunting melalui distribusi sumber daya yang berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar pelibatan sektor swasta diintegrasikan secara formal sejak tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menjamin keberlanjutan dampak jangka panjang.

Kata Kunci: Bank BCA; Collaborative Governance; Penurunan Stunting; Public Value; Sinergitas Lintas Sektor.

1. LATAR BELAKANG

Stunting sebagai bentuk malnutrisi kronis telah menjadi isu prioritas global yang selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 2 (*Zero Hunger*) dan Tujuan 3 (*Good Health and Well-being*). Di Indonesia, komitmen percepatan penurunan stunting

ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Namun, capaian di lapangan masih menunjukkan tantangan. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 21,6%, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan kondisi empiris. Situasi ini menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (*human capital*) sehingga membutuhkan penanganan yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan. Kesenjangan antara target dan realisasi dapat dilihat secara jelas melalui perbandingan data prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019-2024 & Perpres No. 72 Tahun 2021

Gambar 1. Tren Prevalensi Stunting Nasional dan Target (2019-2024).

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa meskipun terdapat tren penurunan, kesenjangan antara prevalensi aktual (21,6%) dengan target 2024 (14%) masih cukup signifikan, yang mengindikasikan perlunya akselerasi program melalui kolaborasi multi-sektor. Percepatan penurunan stunting juga sulit dicapai apabila beban intervensi hanya bertumpu pada APBN dan APBD yang memiliki keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini mendorong perlunya pendekatan tata kelola yang menekankan kolaborasi lintas aktor, bukan semata model government yang bergantung pada peran pemerintah. Dalam teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan (Ansell & Gash, 2008) keterbatasan sumber daya sektor publik membuka kebutuhan pelibatan aktor non-negara, termasuk sektor privat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada titik ini, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperkuat jangkauan layanan, menjaga kesinambungan program, dan menutup celah pembiayaan intervensi di tingkat lokal.

Peran sektor perbankan swasta, termasuk Bank BCA, dalam konteks ini semakin relevan. CSR/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak lagi dipahami sebatas kegiatan filantropi, melainkan berkembang sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan (Fadhilah & Anggraini, 2025). Bank BCA melalui program Bakti BCA telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui kemitraan PASTI (*Partnership to Accelerate Stunting Reduction in Indonesia*) bersama BKKBN dan USAID dengan kontribusi mencapai US\$1 juta untuk periode 2023-2026. (Agung Abdillah, 2023) menekankan bahwa integrasi CSR ke dalam agenda publik dapat berperan sebagai pelengkap untuk menutup kesenjangan sumber daya pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat ditanggung pemerintah.

Namun, kontribusi CSR akan efektif apabila terdapat sinergi yang jelas dengan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah. Pada praktiknya, CSR sering masih berjalan parsial karena koordinasi yang terbatas, pembagian peran yang belum tegas, dan program yang belum sepenuhnya mengacu pada prioritas daerah. Kondisi ini dapat memunculkan fragmentasi kebijakan, di mana intervensi berjalan sendiri-sendiri dan dampaknya kurang optimal. (Ade dkk., 2024) menjelaskan bahwa ketidakterpaduan antara program perusahaan dan agenda pembangunan dapat menurunkan efektivitas program karena sumber daya tidak diarahkan pada kebutuhan prioritas secara terukur.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis untuk pencegahan dan penanganan stunting. Akan tetapi, implementasi program di lapangan masih berhadapan dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Menurut penelitian (Susanti dkk., 2025) Ruang anggaran yang terbatas dapat memengaruhi jangkauan intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk layanan kesehatan, edukasi gizi, dan perbaikan sanitasi. Dalam kondisi ini, kemitraan dengan pihak di luar pemerintah menjadi penting untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan kelompok sasaran menerima intervensi yang dibutuhkan.

Sebagai respons, Bank BCA Cabang Ponorogo melalui program "Bakti BCA" menjalankan intervensi yang diarahkan pada dukungan kesehatan anak, termasuk edukasi pencegahan stunting untuk remaja, program kesehatan balita, serta penyediaan paket nutrisi bergizi bagi balita berisiko. Program Bakti BCA merupakan bagian dari komitmen BCA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui lima pilar utama: Bakti Pendidikan, Bakti Kesehatan, Bakti Budaya, Desa Bakti BCA, dan Bakti Lingkungan. Praktik ini sejalan dengan temuan (Pratiwi & Fajri, 2025) bahwa CSR di negara berkembang kerap berkembang sebagai dukungan sosial untuk membantu mengisi kekurangan layanan dasar yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi pemerintah.

Meski demikian, keberadaan program CSR tidak otomatis menjamin ketepatan sasaran dan keselarasan dengan kebutuhan prioritas daerah. Isu utama yang perlu dikaji bukan sekadar ada atau tidaknya bantuan, melainkan kualitas sinergi antara desain program CSR dan peta masalah serta prioritas intervensi Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait. Tanpa koordinasi berbasis data dan mekanisme kolaborasi yang jelas, intervensi berisiko tumpang tindih sasaran, tidak fokus pada wilayah prioritas, atau tidak terintegrasi dengan program pemerintah. (Cide, 2017) menegaskan bahwa fragmentasi sering terjadi ketika aktor non-pemerintah menjalankan program berdasarkan agenda sendiri tanpa koordinasi yang terlembaga, sehingga memicu inefisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh masih terbatasnya literatur yang membahas sinergi CSR sektor perbankan dengan isu kesehatan publik, khususnya stunting. (Utama dkk., 2025) menunjukkan bahwa kajian CSR lebih banyak menyoroti kontribusi sosial perusahaan pada isu umum seperti pengentasan kemiskinan atau pendidikan, sehingga ruang kajian tentang mekanisme kolaborasi CSR untuk penanganan stunting masih relatif terbuka. Karena itu, evaluasi sinergitas program CSR Bank BCA Ponorogo dengan kebijakan pemerintah daerah menjadi penting, baik untuk memperkuat rujukan akademik maupun untuk menilai apakah program benar-benar menghasilkan nilai publik (*public value*) sebagaimana kerangka Moore (1995) dalam penelitian (Thabit dkk., 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memastikan program CSR memberi dampak yang terukur dan berkelanjutan, serta tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau kepentingan citra semata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Public Value

Mark Moore (1995) dalam penelitian (Thabit dkk., 2025) menekankan bahwa penciptaan nilai publik merupakan fokus utama manajer sektor publik, yakni cara berpikir dan bertindak strategis untuk menghadapi kompleksitas layanan serta mengevaluasi daya guna dan efisiensi pelayanan publik. Nilai publik terbentuk dari relasi individu dan masyarakat, berangkat dari kebutuhan dasar yang dinilai secara subjektif, dipengaruhi kondisi emosional-motivasi, dan terus diproduksi melalui praktik layanan. Dalam konteks ini, nilai publik semakin kuat ketika program atau layanan mampu memenuhi kebutuhan warga dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Untuk menilai penciptaan nilai publik, digunakan pendekatan *Public Value Scorecard* yang dikembangkan oleh (Geeraert & van Bottenburg, 2025) yang membantu organisasi melihat dampak kinerja secara cepat namun tetap komprehensif dengan mempertimbangkan

trade-off berbagai tujuan. (Papi dkk., 2018) menguraikan pengukuran nilai publik pada dimensi moral-etika, hedonistik-estetika, utilitarian-instrumental, politik-sosial, serta aspek ekonomi-keuangan agar dapat diukur secara praktis. Melalui scorecard ini, manajer dapat menilai apakah suatu program benar-benar bermanfaat, layak secara sosial, dapat diterima secara politis, memberi pengalaman positif, dan menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Collaborative Governance

Collaborative governance menekankan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta dan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan program publik. Sejalan dengan (Astuti dkk., 2020) serta (Ansell & Gash, 2008) *collaborative governance* dipahami sebagai pengaturan tata kelola yang formal, deliberatif, dan berorientasi konsensus, di mana lembaga publik berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan non-negara untuk merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan. Kolaborasi dalam hal ini bersifat strategis karena mencakup penyelarasan tujuan, pembagian risiko dan manfaat, pengelolaan sumber daya, serta penyesuaian budaya organisasi, sehingga tidak terbatas pada sekadar model pelayanan.

Konsep ini umumnya diterapkan untuk menangani persoalan publik yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau sektor saja. (Kurniawan dkk., 2025) juga menjelaskan adanya pergeseran manajemen darurat dari model birokrasi *top-down* menuju jejaring yang lebih fleksibel untuk memperkuat koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi antarorganisasi. Karena bencana memengaruhi berbagai aspek kehidupan, pengelolaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar respons dan pemulihan dapat berjalan lebih terpadu serta efektif.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang disusun untuk menilai sejauh mana manfaat suatu kebijakan atau program pemerintah yang telah dilaksanakan (Situmorang, 2020). Proses evaluasi dilakukan melalui teknik pengukuran dan metode analisis tertentu sehingga mampu memberikan penilaian yang sistematis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan. Keberhasilan program biasanya ditentukan dari kesesuaian antara agenda dan perencanaan dengan tahap pelaksanaan, serta adanya keberlanjutan aktivitas yang muncul sebagai dampak program. Untuk program pemerintah, evaluasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang menegaskan bahwa evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap

rencana dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2003) dalam penelitian (Riisyie Rantung, 2024) terdapat enam kriteria evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Efektivitas (*effectiveness*): menilai apakah suatu alternatif kebijakan berhasil mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis dan umumnya diukur melalui unit produk/layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi (*efficiency*): menilai besarnya usaha atau biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi terkait rasionalitas ekonomi, yaitu hubungan antara hasil dan biaya/usaha, biasanya dihitung dalam biaya moneter.
- c. Kecukupan (*adequacy*): menilai sejauh mana tingkat efektivitas mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menjadi sumber masalah. Kecukupan menekankan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
- d. Perataan/Keadilan (*equity*): menilai pemerataan distribusi dampak dan beban kebijakan pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Kriteria ini terkait rasionalitas legal dan sosial.
- e. Responsivitas (*responsiveness*): menilai sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan dapat dianggap gagal bila tidak menjawab kebutuhan nyata kelompok sasaran meskipun efektif, efisien, dan adil.
- f. Ketepatan (*appropriateness*): menilai kesesuaian tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan tersebut. Ketepatan bersifat substantif karena mempertimbangkan dua atau lebih kriteria secara bersamaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk meneliti evaluasi sinergitas program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank BCA Ponorogo dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah terkait percepatan penurunan angka stunting. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dinamika koordinasi dan integrasi program antar lembaga, mulai dari tahap sinkronisasi data sasaran stunting, penyelarasan strategi intervensi gizi maupun sanitasi, hingga eksekusi program di lapangan, serta mengeksplorasi dampak riil yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat terhadap peningkatan status kesehatan balita. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan informan yang merepresentasikan unsur sinergi, yakni manajemen Bank BCA Ponorogo, Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan, Bappeda, atau Pemerintah Desa), kader Posyandu, serta keluarga dengan risiko stunting sebagai penerima manfaat utama, yang dilengkapi dengan

observasi partisipatif pada kegiatan edukasi pencegahan stunting, program kesehatan balita, atau penyaluran bantuan paket nutrisi, serta telaah dokumen terkait laporan kinerja CSR Bakti BCA, Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan stunting, dan data prevalensi stunting setempat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas CSR Bank BCA dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Stunting

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis sinergitas Program CSR Bank BCA Ponorogo dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah untuk percepatan penurunan angka stunting, dengan menggunakan teori *collaborative governance*, *public value* dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, sinergitas kolaborasi dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. *Collaborative governance*

Collaborative governance, sebagaimana didefinisikan oleh Ansell dan Gash, merupakan sebuah aransemen pengelolaan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan aktor non-negara secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Dalam konteks penanganan stunting di Kabupaten Ponorogo, proses kolaborasi ini tidak terjadi secara serta-merta, melainkan diawali dengan tahapan kondisi awal (*starting conditions*) yang mempertemukan kebutuhan sumber daya Pemerintah Daerah dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan temuan di lapangan, inisiasi kerjasama bermula dari adanya kesadaran akan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengcover seluruh desa yang terpapar stunting, yang kemudian direspons oleh Bank BCA melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) Bakti BCA. Tahap awal ini menjadi fondasi untuk menilai apakah ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya menjadi penghambat, namun fakta menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki insentif yang kuat untuk berpartisipasi, di mana Pemda membutuhkan dukungan dana operasional intervensi gizi, sedangkan Bank BCA membutuhkan legitimasi sosial dan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan.

Proses pembangunan kepercayaan (*trust building*) menentukan keberlanjutan sinergitas antara Bank BCA dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini terlihat dari intensitas komunikasi yang bergeser dari sekadar hubungan administratif surat-menyurat menjadi dialog tatap muka yang lebih substantif. Kepercayaan ini tumbuh ketika kedua belah pihak menyepakati transparansi data penerima manfaat, di mana Bank BCA diberikan akses untuk memverifikasi data sasaran stunting yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan agar bantuan yang

diberikan tepat sasaran. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan dari unsur perencanaan pemerintah daerah yang menyebutkan: *"Awalnya memang sebatas koordinasi formal lewat surat permohonan dukungan program, tapi setelah kami duduk bersama dan memaparkan data by name by address anak stunting, pihak BCA jadi lebih yakin. Mereka melihat kami serius menangani ini, jadi rasa percaya itu muncul kalau dana CSR mereka benar-benar dipakai untuk program kesehatan yang terukur, bukan untuk kegiatan seremonial saja."* Pernyataan ini mengindikasikan bahwa transparansi data menjadi katalisator utama dalam mengubah sikap skeptis menjadi saling percaya yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan kolaborasi jangka panjang.

Implementasi kolaborasi ini menunjukkan adanya proses dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) yang mengarah pada pemahaman bersama (*shared understanding*), bukan sekadar hubungan instruksional satu arah dari pemerintah ke swasta. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bank BCA tidak hanya ditempatkan sebagai donatur pasif yang menerima instruksi, melainkan dilibatkan dalam penentuan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih efektif dan akuntabel. Pola interaksi ini mencerminkan prinsip deliberatif, di mana keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai konsensus mengenai jenis intervensi yang paling mendesak, apakah berupa edukasi pencegahan stunting untuk remaja, program kesehatan balita, atau penyediaan paket nutrisi. Hal ini dikonfirmasi oleh tanggapan dari pihak manajemen Bank BCA yang menyatakan: *"Kami tidak ingin hanya sekadar transfer dana lalu selesai. Kami sampaikan ke dinas, kalau bisa program ini bentuknya edukasi dan pendampingan langsung yang berdampak jangka panjang. Syukurnya Pemda setuju, jadi kami bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan program, bukan cuma sekadar setor uang."* Adanya negosiasi dan masukan dari pihak swasta yang diakomodasi oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa struktur tata kelola yang terbangun bersifat partisipatif dan setara, menghindari dominasi sepihak yang seringkali menjadi penyebab kegagalan kemitraan pemerintah-swasta.

Ditinjau dari perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn, khususnya pada kriteria ketepatan (*appropriateness*), model kolaborasi yang diterapkan di Ponorogo ini dinilai memiliki relevansi yang tinggi terhadap karakteristik masalah yang ditangani. Stunting merupakan permasalahan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral atau mengandalkan satu sumber anggaran saja. Dengan demikian, *collaborative governance* adalah langkah yang tepat karena mampu mengintegrasikan kekuatan birokrasi pemerintah yang memiliki data dan otoritas regulasi, dengan fleksibilitas dan sumber daya finansial yang dimiliki oleh sektor perbankan swasta. Ketepatan ini terbukti

dari kemampuan kolaborasi tersebut dalam mengisi celah layanan yang tidak terjangkau oleh program reguler dinas kesehatan, sehingga intervensi stunting menjadi lebih komprehensif. Sinergitas ini bukan hanya sebuah pilihan strategis, melainkan sebuah kebutuhan substantif untuk memastikan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting memiliki daya dukung yang memadai untuk mencapai target kinerja daerah.

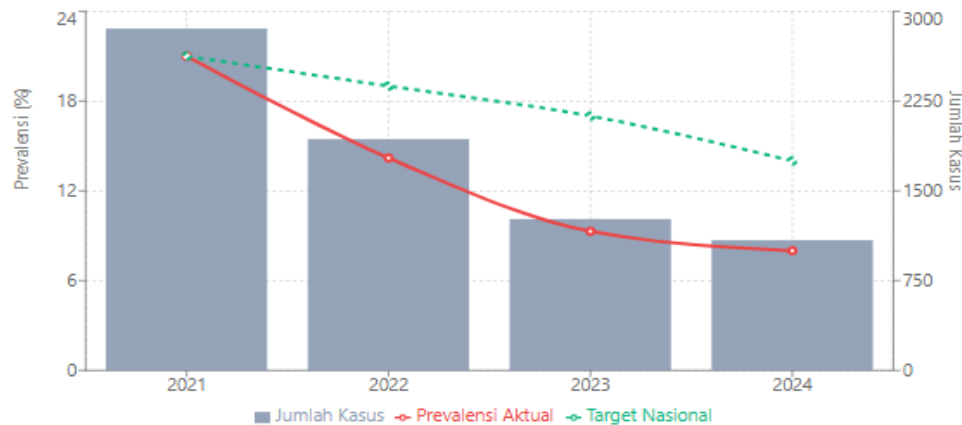
2. Evaluasi Kinerja Program

a. Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam konteks ini adalah penurunan prevalensi stunting. Program Bakti BCA yang diimplementasikan di Kabupaten Ponorogo menunjukkan capaian yang selaras dengan target kinerja pemerintah daerah, terutama dalam aspek perbaikan status gizi balita melalui program edukasi pencegahan stunting untuk remaja dan program kesehatan balita. Indikator efektivitas terlihat dari adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting sejak dini, serta tren positif pada grafik pertumbuhan balita di desa lokus stunting pasca-intervensi yang dilakukan secara intensif selama periode program berjalan. Keberhasilan teknis ini secara langsung menciptakan nilai utilitarian-instrumental, di mana program tersebut memberikan kegunaan praktis dan manfaat fisik yang nyata bagi penerima manfaat, yakni meningkatnya derajat kesehatan anak yang sebelumnya mengalami gangguan pertumbuhan.

Keberhasilan program dalam mengubah status kesehatan sasaran dikonfirmasi melalui pemantauan rutin di Posyandu wilayah binaan. Data lapangan mengindikasikan bahwa program edukasi yang dilakukan memiliki pendekatan yang tepat guna sesuai rekomendasi ahli gizi dinas kesehatan, sehingga mampu memberikan dampak perubahan perilaku yang terukur. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu Bidan Desa yang bertugas di lokasi fokus intervensi: *"Program ini menurut saya sangat efektif karena pendekatannya edukatif dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sesaat. Program edukasi untuk remaja dan program kesehatan balita yang dilakukan BCA benar-benar menyasar pokok masalahnya yaitu pencegahan dan deteksi dini. Kami melihat ada perubahan kesadaran orang tua dan remaja tentang pentingnya gizi, serta perubahan status pada balita yang sebelumnya ada di garis merah, setelah rutin mendapat intervensi dari program ini, perlahan grafik di KMS (Kartu Menuju Sehat)-nya naik ke pita hijau. Jadi manfaatnya memang terasa langsung secara fisik pada anak-anak."* Pernyataan tersebut didukung oleh data kuantitatif yang menunjukkan tren

penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo selama periode implementasi program sebagai berikut :



Gambar 2. Tren Penurunan Stunting Kabupaten Ponorogo (2021-2024).

Berdasarkan Gambar diatas prevalensi stunting di Kabupaten Ponorogo menunjukkan penurunan yang konsisten dan signifikan, dari 21% pada tahun 2021 menjadi 9,3% pada tahun 2023, melampaui target nasional 14% untuk tahun 2024. Penurunan drastis ini terjadi terutama pada periode 2022-2023, bertepatan dengan intensifikasi program Bakti BCA yang dimulai tahun 2023, mengindikasikan kontribusi positif dari sinergitas CSR-pemerintah daerah dalam akselerasi penurunan stunting.

b. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi merupakan kriteria evaluasi yang membandingkan antara besarnya usaha atau sumber daya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pelaksanaan program penanganan stunting melalui skema CSR Bank BCA menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, terutama dari aspek kecepatan eksekusi program dan penghematan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme penyaluran dana CSR yang lebih fleksibel dan ringkas dibandingkan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah memungkinkan program sampai ke masyarakat lebih cepat, sehingga intervensi gizi tidak tertunda. Dari perspektif nilai ekonomi-keuangan, sinergitas ini memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah karena adanya pembagian beban pembiayaan (*cost-sharing*), di mana dana CSR mengisi kekosongan anggaran untuk pos-pos yang belum terdani secara optimal oleh pemerintah, sehingga alokasi APBD dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas lainnya.

Keunggulan dari aspek efisiensi pembiayaan dan waktu ini diakui sebagai nilai tambah yang signifikan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Sinergitas ini memangkas birokrasi yang seringkali menjadi hambatan dalam distribusi bantuan sosial, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dikonversi menjadi manfaat maksimal bagi

masyarakat tanpa kebocoran administratif yang berlebihan. Seorang staf perencanaan di Bappeda Kabupaten Ponorogo memberikan tanggapan terkait aspek ini: *"Kalau mengandalkan APBD murni, prosesnya panjang, harus menunggu ketok palu anggaran dan proses lelang yang memakan waktu bulanan. Dengan masuknya CSR BCA ini, ketika ada kebutuhan program edukasi atau intervensi kesehatan yang butuh penanganan segera, prosesnya bisa lebih cepat dieksekusi. Ini sangat membantu kami menghemat anggaran daerah sekaligus mempercepat penanganan di lapangan."*

c. Pemerataan (Equity)

Pemerataan atau keadilan merujuk pada distribusi dampak kebijakan secara adil kepada berbagai kelompok masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah marginal. Dalam implementasinya, program CSR Bakti BCA ini telah menerapkan prinsip keadilan distributif dengan memprioritaskan alokasi program ke desa-desa terpencil yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan aksesibilitas rendah, bukan sekadar di wilayah perkotaan yang dekat dengan kantor cabang bank. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, melainkan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan sesuai data pemetaan sosial. Dengan menyasar kelompok rentan tersebut, program ini secara simultan memenuhi dimensi nilai moral-etika (*moral-ethical value*), yakni perwujudan tanggung jawab sosial untuk melindungi hak dasar warga negara yang kurang mampu dan menegakkan keadilan sosial di sektor kesehatan.

Distribusi program Bakti BCA yang menyebar hingga ke pelosok desa menunjukkan komitmen perusahaan dan pemerintah daerah dalam mengurangi disparitas pelayanan kesehatan antarwilayah. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa penerima manfaat telah diverifikasi secara ketat agar tidak terjadi salah sasaran atau tumpang tindih dengan program sosial lainnya. Komitmen terhadap prinsip keadilan distributif tercermin dari pola sebaran geografis implementasi program di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1. Distribusi Geografis Program Bakti BCA di Ponorogo.

Kecamatan	Jumlah Desa	Prevalensi (%)	Kategori Desa	Aksesibilitas
Badegan	3	12.5%	Tertinggal	15-20 km
Sampung	2	11.8%	Sangat Tertinggal	>20 km
Sukorejo	2	10.2%	Tertinggal	15-20 km
Pulung	1	13.1%	Sangat Tertinggal	>20 km
Babadan	1	9.8%	Berkembang	<15 km
Mlarak	1	11.2%	Tertinggal	15-20 km
Jetis	1	8.9%	Berkembang	<15 km
Slahung	1	10.5%	Tertinggal	15-20 km
TOTAL	12 Desa	10,9% (Rerata)	8 Kecamatan	

Berdasarkan peta distribusi pada gambar diatas program Bakti BCA menjangkau 12 desa lokus stunting yang tersebar di 8 kecamatan, dengan prioritas pada wilayah dengan aksesibilitas rendah dan prevalensi stunting tinggi. Data menunjukkan bahwa 75% desa sasaran berada di kategori desa tertinggal atau sangat tertinggal dengan jarak rata-rata >15 km dari pusat kecamatan, membuktikan bahwa program ini tidak hanya terkonsentrasi di wilayah urban yang mudah dijangkau. Aspek pemerataan ini mendapat apresiasi dari salah satu Tokoh Masyarakat di desa penerima manfaat yang menyatakan: *"Kami sangat bersyukur karena program ini adil, benar-benar sampai ke warga kami yang rumahnya jauh di pelosok dan memang ekonominya sulit. Biasanya program itu cuma sampai di desa yang dekat jalan raya saja, tapi kali ini pihak BCA dan pemda benar-benar turun ke bawah mencari siapa yang paling butuh. Ini membuat warga merasa diperlakukan adil dan tidak dikesampingkan mentang-mentang kami tinggal di pinggiran."*

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu memuaskan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok sasaran. Dalam implementasi program ini, tingkat responsivitas terlihat dari kesesuaian jenis program yang diberikan dengan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, seperti program edukasi pencegahan stunting untuk remaja yang menjawab kebutuhan akan pengetahuan gizi sejak dini, serta program kesehatan balita yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Tingginya responsivitas ini secara simultan menciptakan nilai politik-sosial, yakni terbangunnya legitimasi dan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap keseriusan Pemerintah Daerah dan kepedulian sosial Bank BCA. Ketika masyarakat merasa didengar dan dibantu sesuai kebutuhannya, ikatan sosial antara warga, sektor swasta, dan pemerintah menjadi semakin kuat, menciptakan stabilitas sosial yang mendukung keberlanjutan pembangunan.

Kepuasan masyarakat terhadap layanan program menjadi indikator utama bahwa program ini bukan sekadar top-down, melainkan memperhatikan dinamika kebutuhan di tingkat bawah. Respons yang cepat terhadap keluhan atau masukan warga selama program berjalan juga menjadi faktor penentu tingginya penerimaan masyarakat terhadap inisiatif ini. Salah satu ibu penerima manfaat program menyampaikan kepuasannya dalam wawancara: *"Saya senang sekali karena programnya bukan bantuan yang tidak kami butuhkan. Program edukasi untuk anak remaja saya sangat membantu, jadi dia tahu pentingnya makan bergizi sejak sekarang. Untuk anak balita saya juga dapat pendampingan kesehatan rutin dari program BCA. Jadi kami merasa pemerintah dan bank benar-benar mengerti apa yang kami rasakan dan butuhkan sehari-hari."*

3. Penciptaan Nilai Publik (*Public Value*) dalam Sinergitas Penanganan Stunting

Konsep *Public Value* yang digagas oleh Mark Moore menekankan bahwa keberhasilan manajemen sektor publik tidak hanya diukur dari efisiensi administratif atau kepatuhan terhadap regulasi semata, melainkan dari kemampuan institusi dalam menciptakan nilai tambah yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat melalui layanan yang berkualitas. Dalam konteks sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Bank BCA, penciptaan nilai publik terjadi ketika kolaborasi tersebut mampu mengubah input sumber daya berupa dana CSR Bakti BCA menjadi dampak sosial yang signifikan, yakni perbaikan status gizi balita dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan stunting. Sinergitas ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar aktivitas filantropi korporasi menjadi strategi investasi sosial yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aktor privat dan publik telah berhasil menyelaraskan "lingkungan pengesahan" (*authorizing environment*) dengan "kapasitas operasional" untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Penerapan program Bakti BCA dalam penanganan stunting ini secara substantif telah memenuhi dimensi nilai utilitarian dan nilai moral-etika sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *Public Value* oleh Meynhardt. Nilai utilitarian terlihat dari kegunaan praktis program yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan dasar fisik dan pengetahuan penerima manfaat, sedangkan nilai moral tercermin dari keberpihakan program terhadap kelompok masyarakat rentan yang selama ini belum tersentuh anggaran daerah secara optimal. Keberhasilan penciptaan nilai ini divalidasi oleh pernyataan Pimpinan Bank BCA Ponorogo yang mengungkapkan pandangannya terkait dampak program: *"Bagi kami, keberhasilan itu bukan cuma soal berapa rupiah dana CSR yang terserap habis, tapi soal nilai manfaatnya. Ketika kami melihat data bahwa anak-anak di desa binaan tumbuh sehat dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan stunting meningkat berkat program ini, di situlah kami merasa investasi sosial perusahaan benar-benar bernilai. Jadi bukan sekadar memberi bantuan lalu selesai, tapi ada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan yang kami bangun bersama pemerintah daerah."*

Kolaborasi ini juga berhasil membangun nilai politik-sosial yang kuat berupa peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat. Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari program ini cenderung memiliki persepsi positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan reputasi korporasi. Kepuasan masyarakat ini menjadi indikator penting bahwa program tidak hanya berjalan secara teknokratis, tetapi juga diterima secara sosiologis. Transformasi persepsi ini terekam dalam tanggapan salah satu Kader

Pembangunan Manusia (KPM) di tingkat desa yang terlibat langsung dalam pendampingan: *"Dulu warga itu agak skeptis kalau ada program bantuan dari swasta, dianggapnya paling tidak tepat sasaran atau cuma janji. Tapi dengan adanya kerjasama BCA dan Pemda ini yang programnya nyata berupa edukasi dan pendampingan kesehatan berkelanjutan, warga jadi percaya lagi. Mereka merasa diperhatikan dan dihargai kebutuhannya, sehingga dukungan warga terhadap program-program desa lainnya juga ikut meningkat."*

Kesimpulannya, evaluasi terhadap sinergitas program CSR Bank BCA dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah ini menegaskan bahwa kolaborasi tersebut telah melampaui capaian output fisik semata dan berhasil mewujudkan Public Value yang berkelanjutan. Integrasi antara sumber daya sektor privat melalui Bakti BCA dengan kewenangan regulasi pemerintah daerah terbukti efektif mengatasi hambatan struktural dalam penanganan stunting. Model kemitraan ini membuktikan bahwa penciptaan nilai publik tidak harus selalu bersumber dari anggaran negara, melainkan dapat dimaksimalkan melalui tata kelola kolaboratif yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama. Dampak konkret dari penciptaan nilai publik ini dapat diukur melalui perubahan indikator kesehatan balita di desa-desa lokus program sebelum dan sesudah implementasi.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Kesehatan Balita Pre-Post Program.

Indikator Kesehatan	Sebelum Program (%)	Sesudah Program (%)	Perubahan	Status
Gizi Normal (BB/TB)	62%	84%	+22 poin	✓ Membaik
Gizi Kurang	20%	10%	-10 poin	✓ Membaik
Stunting	18%	6%	-12 poin	✓ Membaik
Imunisasi Lengkap	71%	93%	+22 poin	✓ Membaik
ASI Eksklusif	58%	79%	+21 poin	✓ Membaik
PMT Teratur	45%	88%	+43 poin	✓ Membaik

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbaikan signifikan pada seluruh indikator kesehatan balita, dengan peningkatan paling menonjol pada status gizi normal (dari 62% menjadi 84%) dan penurunan drastis kasus stunting (dari 18% menjadi 6%). Data antropometri ini menjadi bukti empiris bahwa kolaborasi strategis antara BCA dan Pemda Ponorogo telah berhasil mentransformasi input sumber daya menjadi outcomes kesehatan yang terukur dan berkelanjutan. Keberhasilan ini menjadi modal sosial yang berharga bagi keberlanjutan program pembangunan manusia di Kabupaten Ponorogo di masa mendatang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Bank BCA Ponorogo dan Pemerintah Daerah melalui program "Bakti BCA" telah berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mengakselerasi penurunan angka stunting, serta berhasil menciptakan nilai publik nyata berupa perbaikan status gizi balita, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan stunting, dan penyediaan program kesehatan yang inklusif bagi masyarakat rentan. Mekanisme *collaborative governance* yang diterapkan terbukti mampu menjembatani keterbatasan anggaran daerah melalui intervensi yang efisien, responsif, dan berkeadilan, sehingga terbangun legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat. Sebagai rekomendasi strategis untuk menjamin keberlanjutan dampak, disarankan agar pelibatan sektor swasta tidak hanya terbatas pada tahap eksekusi program, melainkan diintegrasikan secara formal sejak tahap perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan sinkronisasi jangka panjang yang lebih sistematis antara agenda CSR korporasi dengan prioritas pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. A. (2023). *Kontribusi corporate social responsibility PTT Exploration and Production Public Company Limited terhadap permasalahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020–2022* [Skripsi tidak dipublikasikan].
- Ade, A., Saswini, U., Pramudikta, S., Jarwanto, D., & Haris, M. (2024). Efektivitas program Sehati terhadap perbaikan status gizi balita program CSR PT Pertamina Patra Niaga IT Makassar. *Pontianak Nutrition Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.30602/pnj.v7i2.1552>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*.
- Cide, C. L. M. (2017). *Collaborative governance: Beyond mere participation*.
- Fadhilah, R. S., & Anggraini, C. (2025). Implementasi strategi komunikasi CSR pada program kesehatan penurunan angka stunting (Studi kasus program CSR PT Indo Raya Tenaga di Kota Cilegon). *E-Proceeding of Management*, 12(5), 5612–5620.
- Geeraert, A., & Van Bottenburg, M. (2025). How the pursuit of public value facilitates collaborative governance: The case of La Vuelta Holanda. *Public Management Review*. <https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2484800>
- Kurniawan, K., Waspodo, W., & Putra, R. (2025). Model collaborative governance untuk pengelolaan CSR pada UMKM di Kabupaten Muara Enim. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2), 30–39. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v7i2.6438>

- Papi, L., Bigoni, M., Bracci, E., & Deidda Gagliardo, E. (2018). Measuring public value: A conceptual and applied contribution to the debate. *Public Money & Management*, 38(7), 503–510. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1439154>
- Pratiwi, W., & Fajri, C. (2025). Manajemen komunikasi program corporate social responsibility (CSR) “Rembuk Stunting” The Park Mall Solo. *Juni*, 9(1), 57–72.
- Riisyie Rantung, M. I. (2024). *Evaluasi kebijakan publik* (Ed. 1). Thata Media Group.
- Situmorang, C. (2020). *Kebijakan publik: Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan* (Vol. 1).
- Susanti, M., Arifin, S., Zoelkarnain, I., Nugroho, A., & Syahadatina Noor, M. (2025). Implementasi kebijakan intervensi program corporate social responsibility PT Adaro Indonesia dalam penurunan stunting di Kabupaten Balangan. *Jurnal Ners*, 9(1), 274–286.
- Thabit, S., Sancino, A., & Mora, L. (2025). Strategic public value(s) governance: A systematic literature review and framework for analysis. *Public Administration Review*, 85(3), 885–906. <https://doi.org/10.1111/puar.13877>
- Utama, F., Abdillah, R. A., Budiharto, K., Mandang, H., & Malaranti, E. (2025). Lokal melalui program CSR ANTAM G-BEST PT Antam Tbk. UBPN Maluku Utara: Inovasi sosial untuk cegah risiko stunting di Halmahera Timur. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 7(2). <https://doi.org/10.54783/jin.v7i2.1384>